



Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan  
**2024**



**FIGHT AGAINST  
X-CRIME**

[gakkum.menlhk.go.id](http://gakkum.menlhk.go.id)

Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





## TIM PENYUSUN

**Pengarah :**

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

**Penanggungjawab :**

Dr. Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.

**Ketua :**

Rini Puspita Sari, S.Hut

**Anggota :**

Gesta Monica Noor Alfiat, S.E

Helmi Hanafiah, S.Hut

Jon Piter Zai, S.Hut

Prayudi Suharno, S.H.

Octa Dandy Saiyar, S.E, M.M.

Disusun dan diterbitkan oleh :

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja ini.

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,  
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta.



**SCAN HERE**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2023 dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan guna mencapai sasaran strategis Direktorat PPLHK 2020-2024.

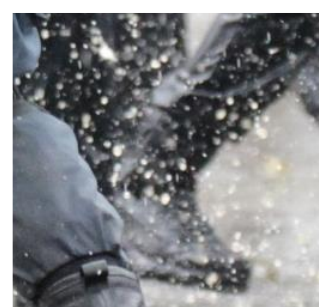
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan LKj ini. Semoga LKj Direktorat PPLHK Tahun 2023 dapat bermanfaat sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasinya pada tahun-tahun mendatang

Jakarta, 10 Januari 2024  
Plt. Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,



  
Ir. Ir. Susty Iriyono, M.Si.

# DAFTAR ISI



# DAFTAR HALAMAN

Bab	Uraian Halaman	Hal
	Kata Pengantar	2
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
A	Latar Belakang	6
B	Kedudukan Tugas dan Fungsi	7
C	Pohon Kinerja	
D	Struktur Organisasi	9
E	Sumber Daya Manusia	10
F	Sumber Dana	11
G	Sarana Prasarana	12
H	Peraturan Perundang-Undangan	15
<b>II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>18</b>
A	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	21
B	Perjanjian Kerja Tahun 2023	22
<b>III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
A	Capaian dan Prognosis Indikator Kinerja UKE I	24
B	Capaian dan Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan	25
C	Capaian dan Prognosis Indikator Kinerja Dit. PPLHK	28
D	Efisiensi Penggunaan dan Kinerja Anggaran	32
E	Penghargaan Atas Prestasi Kinerja	34
F	Dukungan Terhadap Prioritas Nasional	35
<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>37</b>
	Lampiran-Lampiran	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# A. LATAR BELAKANG

Perambahan kawasan hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta pembalakan liar merupakan beberapa masalah kehutanan yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pengamanan aset hutan, mencegah serta mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan dari kejahatan terhadap hutan merupakan kegiatan utama Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH). Memikul tanggung jawab yang tidak ringan, Direktorat PPLHK berkomitmen melakukan kegiatan terkait pencegahan dan pengamanan hutan.

Ragam kegiatan yang bersifat preventif dan represif digelar dalam rangka memberantas tidak hanya pembalakan liar namun juga kejahatan hutan lainnya seperti perambahan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Diantaranya ialah kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen, operasi pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan menjadi ragam kegiatan yang dihelat Direktorat PPLHK. Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPLHK adalah pencegahan dan pengamanan kawasan hutan, baik Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi (KSA/KPA/TB), dan kawasan-kawasan lain yang bernilai konservasi tinggi yang berada pada berbagai tipe ekosistem seperti terumbu karang, karst, dan lahan basah. Data luas kawasan hutan di Indonesia tersaji pada Tabel dibawah ini.

No	Fungsi Kawasan	Luasan
1	Kawasan Konservasi	27.411.892,07
2	Hutan Lindung	29.540.902,55
3	Hutan Produksi Terbatas	26.799.132,58
4	Hutan Produksi	29.151.244,62
5	Hutan Produksi Konversi	12.761.378,03
<b>Jumlah</b>		<b>125.664.549,85</b>

Sumber: Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK (2023)

# B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK

## UNIT KERJA ESELON I

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

## UNIT KERJA ESELON II

**Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

## TUGAS

“melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.” – Pasal 520

## FUNGSI

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan
4. Penyusunan Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria
5. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
6. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
7. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat.

“ ... Dibidang pencegahan, dukungan dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup. – Pasal 521





## C. POHON KINERJA

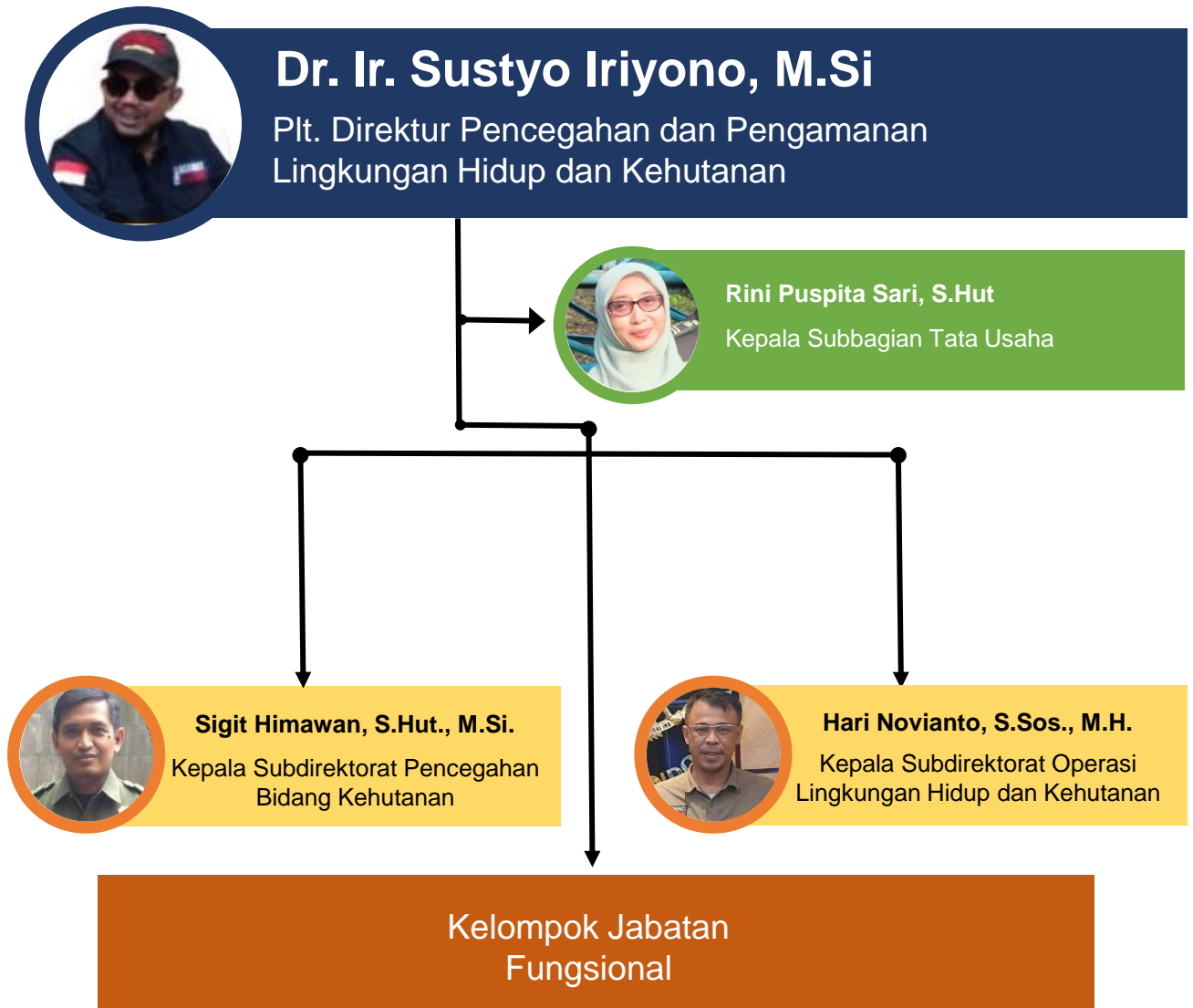
Kegiatan pencegahan dan pengamanan LHK sebagai bagian dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan dalam beberapa komponen sebagaimana tertera dalam Pohon Kinerja yang tertera pada tabel dibawah ini.

Sebagaimana pohon kinerja yang telah dijabarkan diatas, seluruh kegiatan Dit. PPLHK berdasarkan pada Pasal 520 dan 521 pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	20 Laporan
				2. Operasi Pengamanan Hutan	15 Operasi
				3. Operasi Penyelamatan SDA	7 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal 2. Operasi Pembalakan Liar 3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar 4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK 5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan 6. Penguatan Sistem Intelijen 7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	12 Laporan
					3 Operasi
					3 Operasi
					2 Laporan
					2 Laporan
					1 Laporan
					1 Laporan
Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	135 Orang		

# D. STRUKTUR ORGANISASI

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jabatan struktural lingkup Direktorat PPLHK sebagaimana diilustrasikan pada Gambar diatas, diisi oleh 1 orang pejabat Eselon II, 2 orang pejabat Eselon III, 1 orang pejabat Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional yaitu JF Polisi Kehutanan, JF Perencana Ahli Pertama, JF Arsiparis, JF Pranata Keuangan APBN, JF Analis Pengelola Keuangan APBN, JF Pranata Komputer, JF Pengelola BMN dan JF Pengelola Barang dan Jasa. Sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam penanganan kejahatan kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut) termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

# E. SUMBER DAYA MANUSIA

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# 48

### Total Data Pegawai

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Data per 31 Desember 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN	36	10	46
2	NON ASN	1	1	2
Total				48

No	Sumber Daya Manusia	Tingkat Pendidikan							Total
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	S3	
1	ASN	0	0	1	5	32	6	2	46
2	NON ASN	0	0	2	0	0	0	0	2
Total									48

No	Sumber Daya Manusia	Golongan			Total
		II	III	IV	
1	ASN	5	32	9	46
2	NON ASN	-	-	-	2
Total					48

No	Sumber Daya Manusia	Usia (th)				Total
		21-30	31-40	41-50	>50	
1	ASN	18	15	6	7	46
2	NON ASN	0	1	1	0	2
Total						48

# 679



**JABATAN FUNGSIONAL  
POLISI KEHUTANAN**

Data Terpilah		Satuan Kerja		Range Usia				TOTAL
JF Polisi Kehutanan		Pusat	UPT	≤ 30	31-40	41-50	51-65	
SMA	PEREMPUAN	0	18	14	0	4	0	18
	LAKI LAKI	0	309	39	37	118	115	309
D3	PEREMPUAN	0	13	13	0	0	0	13
	LAKI LAKI	0	26	19	1	0	6	26
S1	PEREMPUAN	1	16	4	7	5	1	17
	LAKI LAKI	26	231	27	72	107	51	256
S2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0
	LAKI LAKI	7	30	0	7	21	9	37
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0
	LAKI LAKI	2	0	0	0	0	2	2
Total		36	643	116	123	255	184	679

Data Kepegawaian per 31 Desember 2023

# F. SUMBER DANA

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat PPLHK dibiayai dari sumber dana APBN DIPA BA 29 Tahun 2024, dengan total anggaran sebesar **Rp 41.262.708.000,- (Empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)**. Besarnya DIPA yang diterima oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK dikarenakan adanya Surat Kementerian Keuangan Nomor S-282 /AG/AG.3/2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran DIPA TA 2023 Lingkup Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) LHK yang menerangkan bahwa adanya *Top Up PNBP* yang bersumber dari (i) PNBP Denda Administrasi Bidang Kehutanan dan (ii) PNBP Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dana APBN DIPA BA 29 2023 khususnya Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK mengalami kenaikan yang berimplikasi pada perubahan target Prioritas Nasional (PN) yaitu **Operasi Pengamanan Kawasan Hutan**. Perubahan anggaran yang terjadi ialah yang semula Rp 20.688.955.000,- (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kini menjadi Rp 41.262.708.000,- (Empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Tabel 1. Rincian Anggaran Semula Menjadi Tahun 2023 (Top-Up PNBP)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2023 (Semula)	Anggaran 2023 (Menjadi)
1	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Rp 11.339.955.000,-	Rp 30.902.802.000,-
2	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Rp 7.150.000.000,-	Rp 8.159.906.000,-
3	Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 2.200.000.000,-	Rp 2.200.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp 20.688.955.000,-</b>	<b>Rp 41.262.708.000,-</b>

# G. SARANA PRASARANA

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
KODE	URAIAN		BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
132111	Peralatan dan Mesin	2430	17	32	2415
3010315009	Camera Video Intelejen	10	0	0	10
3010315999	Peralatan Intelejen Lainnya	12	0	0	12
3020101001	Sedan	1	0	0	1
3020101002	Jeep	1	0	0	1
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	11	0	0	11
3020103002	Pick Up	1	0	0	1
3020104001	Sepeda Motor	1	0	0	1
3020104004	Sepeda Motor Patroli	0	3	0	3
3020501016	Pesawat tak berawak	2	0	0	2
3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	0	0	1
3050104005	Filing Cabinet Besi	0	2	0	2
3050104007	Brandkas	1	0	0	1
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	3	0	0	3
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	0	0	1
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	0	2	0	2
3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	1	0	2
3050105027	Alat Pencetak Label	1	0	0	1
3050105048	LCD Projector/Infocus	10	0	0	10
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	0	0	1
3050201003	Kursi Besi/Metal	1	0	0	1
3050204001	Lemari Es	0	1	0	1
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	0	0	3
3050206002	Televisi	8	0	0	8
3050206036	Dispenser	2	1	0	3
3050206045	Coffee Maker	1	0	0	1
3060102165	Camera Conference	1	0	0	1
3060105047	Kamera Udara	4	0	0	4
3060105999	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Lainnya	5	0	0	5
3060201004	Telephone Mobile	1	4	0	5
3060201006	Handy Talky (HT)	8	0	0	8
3060207020	Portable GSM CDMA Jammer	1	0	0	1
3060209005	Network Monitoring System	1	0	0	1
3080141101	Generator	0	1	0	1
3080141170	Microwave Oven	1	2	0	3
3080602046	Air Purifier	2	0	0	2
3080714012	Current Collector, Busbars	2	0	0	2
3090101999	Senjata Genggam Lainnya	369	0	4	365
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	1592	0	28	1564

# G. SARANA PRASARANA

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
KODE	URAIAN		BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
3090110006	Shoot Gun	111	0	0	111
3090402016	Alat Kejut	10	0	0	10
3090402031	Kamera Digital	4	0	0	4
3090403004	GPS	4	0	0	4
3090403011	Helm Tempur	10	0	0	10
3090403012	Rompi Anti Peluru	10	0	0	10
3090404002	Camera Jam Tangan	11	0	0	11
3090404026	Button Camera	11	0	0	11
3090404031	Pen Camera	10	0	0	10
3090404032	Sun Glasses Camera	11	0	0	11
3090406014	GSM Tracknet System	11	0	0	11
3090406015	Universal Forensic Extraction Device (UFED)	1	0	0	1
3090406022	12 Analyst Notebook	1	0	0	1
3090407999	Alsus Fotografi Kepolisian Lainnya	2	0	0	2
3100102002	Lap Top	79	0	0	79
3100102009	Tablet PC	2	0	0	2
3100199999	Komputer Unit Lainnya	1	0	0	1
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	0	0	1
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	0	0	35
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	0	0	5
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	2
3100203017	External/ Portable Hardisk	14	0	0	14
3100204001	Server	1	0	0	1
3100204015	Firewall	1	0	0	1
3150303040	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	2	0	0	2
3150401012	Voice Recorder	15	0	0	15
3150405006	Air Conditioning (AC)	5	0	0	5
135111	Aset Tetap Renovasi	3	0	0	3
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	3	0	0	3
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7	0	0	7
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	0	0	1
3020104001	Sepeda Motor	2	0	0	2
3020104004	Sepeda Motor Patroli	2	0	0	2
3020501016	Pesawat tak berawak	2	0	0	2
TOTAL		2440	17	32	2425

# G. SARANA PRASARANA

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2023 telah dilakukan pada kantor Direktorat PPLHK yang meliputi pengadaan lisensi, peralatan dan mesin, pengadaan seragam Polhut dan SPORC, pengadaan amunisi, pengadaan jasa dan lainnya dengan rincian sebagaimana Tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Jumlah
<b>A</b>	<b>Pengadaan Lisensi, Peralatan dan Mesin</b>	
1	Perpanjangan Lisensi Intelijen Media Analytics/MMA	1 unit
2	Perpanjangan Lisensi LinkR	1 unit
3	Pengadaan Lisensi Subskrib Tableau Eksplorer	1 unit
4	Pengadaan Lisensi Firewall	1 unit
5	Pengadaan Lisensi Tiberio	1 unit
6	Pengadaan Hand Phone Intelijen	4 unit
7	Perpanjangan Filling Cabinet	2 unit
8	Pengadaan Kulkas	1 unit
9	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1 unit
10	Pengadaan Dispenser	1 unit
11	Pengadaan Microwave	2 unit
12	Pengadaan Genset Mini Portable	1 unit
13	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Fungsional Pengamanan KHDTK	3 unit
14	Pengadaan Interactive Whiteboard Android	2 unit
15	Pengadaan SSD 2 TB	23 unit
<b>B</b>	<b>Pengadaan Seragam dan Perlengkapan</b>	
1	Pengadaan Seragam PDL Polhut/SPORC	6000 stel
2	Pengadaan Seragam Dinas PPLHK	47 stel
3	Pengadaan Seragam PDU	10 stel
5	Pengadaan Seragam Kaos Seragam Kegiatan Inventarisasi	850 buah
6	Pengadaan Topi Lapangan Kegiatan Inventarisasi	700 buah
7	Pengadaan Sepatu PPLHK	51 pasang
8	Pengadaan Sepatu Polhut PDH	52 pasang
9	Pengadaan Sepatu Polhut PDL	20 pasang
10	Pengadaan Tas PPLHK	49 buah
<b>C</b>	<b>Pengadaan Bibit Tanaman Dalam Rangka Pemulihan KHDTK</b>	
1	Bibit Pinang	1000 batang
2	Bibit Flamboyan	1000 batang
<b>D</b>	<b>Pengadaan Amunisi</b>	
1	Kaliber 9 x 21 mm	30.000 butir
2	Kaliber 32 (7,65 mm)	20.000 butir
<b>E</b>	<b>Pengadaan Jasa</b>	
1	Pengadaan Jasa Inventarisasi Potensi KHDTK	2 Keg
2	Pengadaan Jasa Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Teknis Perlindungan Hutan	1 Keg
3	Pengadaan Jasa Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Polisi Kehutanan	1 Keg
4	Pengadaan Jasa Pembuatan Master Plan KHDTK Wanalinhut dan Wanadiklat Polhut	2 Keg
5	Pengadaan Jasa Penyusunan DED Bangunan Fisik KHDTK Wanadiklat Polhut	1 Keg
6	Pengadaan Jasa Pembuatan Lanskip Topografi KHDTK	1 Keg
7	Pengadaan Jasa Pembuatan Mekanikal dan Elektrikal Mikrohidro KHDTK	1 Keg
8	Pengadaan Jasa Pembuatan Engineering Design Teknik Civil Mikrohidro KHDTK	1 Keg
9	Pengadaan Jasa Pembuatan Geoteknik Financial Study Mikrohidro KHDTK	1 Keg

# H. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Dalam mengatasi permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan melalui instrumen pencegahan kerusakan hutan dan pengamanan kawasan hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; dan
- c) pemulihan lingkungan

Berdasarkan pengertian tersebut, upaya/kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan terhadap keamanan hutan yang disebabkan manusia merupakan tindakan polisional di bidang kehutanan. Tindakan polisional ini bersifat preemtif, preventif dan represif yang juga menjadi bagian dari penegakan hukum. Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sesuai kewenangannya yang berasal dari dari 3 Undang-Undang (UU), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan/Pasal/ Ayat	Isi
<b>UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>		
1	Pasal 9	Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
<b>UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</b>		
2	Pasal 48 ayat 1	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
3	Pasal 48 Ayat 2	Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



# H. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

No	Peraturan/Pasal/ Ayat	Isi
<b>UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</b>		
4	Pasal 51 ayat 1	Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
<b>UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</b>		
5	Pasal 5	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.
6	Pasal 8	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.
<b>UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</b>		
7	Pasal 21 Ayat 2	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. penyuluhan; c. pembinaan; d. pengawasan; e. pengendalian; dan f. penegakan hukum
8	Pasal 21 Ayat 3	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
<b>PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</b>		
9	Pasal 249 Ayat 1	Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya
10	Pasal 249 Ayat 2	Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya

# H. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

No	Peraturan/Pasal/ Ayat	Isi
<b>PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</b>		
11	Pasal 251	<p>Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;</li> <li>b. melakukan inventarisasi permasalahan;</li> <li>c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;</li> <li>d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;</li> <li>e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;</li> <li>f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;</li> <li>g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;</li> <li>h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;</li> <li>i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;</li> <li>j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; atau</li> <li>k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.</li> </ol>
<b>PermenHut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan</b>		
12	Pasal 44	Menteri, Kepala Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Gubernur, Bupati/Walikota, melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan
13	Pasal 48	Kegiatan komando, dilaksanakan dengan ketentuan: a. Menteri bertindak sebagai pemegang komando dalam operasi penanganan kejahatan bidang kehutanan skala nasional; b. Direktur Jenderal bertindak sebagai pelaksana harian pemegang komando operasi penanganan tipihut skala nasional.



# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**


# ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024



**PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) :**  
**Membangun Lingkungan Hidup,  
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan  
Perubahan Iklim**

**Sasaran Prioritas Nasional 6 (Enam) :**

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Perbaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan perbaikan pada penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB.
- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan perbaikan pada (a) Persentase penurunan Emisi GRK-Kumulatif, (b) Persentase penurunan GRK-Tahunan, dan (c) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK.



Dukungan Ditjen Gakkum KLHK  
Mendukung Prioritas Nasional 6 (Enam)  
dengan Total Anggaran Rp. 150,309 M

Tagging Mitigasi Perubahan Iklim  
Rp 192,732 M

Tagging Anggaran Responsif Gender Rp 2,000 Milliar



Peningkatan kualitas SDM :  
Kesehatan dan Pendidikan

**Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum LHK**



Penanggulangan Pengangguran Disertai Dengan Peningkatan Decent Job

Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK untuk memastikan masyarakat sekitar hutan tidak kehilangan haknya



Mendorong Pemulihan Dunia Usaha

Prinsip *Restorative Justice* dengan Penerapan Sanksi Administratif pada perusahaan sebagai pelaksanaan mandat UUCK



Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)

Penegakan Hukum LHK sebagai bentuk kontribusi pada FOLU Net Sink 2030



Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Penguatan Penegakan Hukum LHK di sekitar kawasan IKN dengan pelaksanaan operasi, pengawasan dan penindakan



**PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) :  
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,  
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA  
DAN PERUBAHAN IKLIM**

**Program  
Prioritas 3 :  
Pembangunan  
Rendah Karbon**



**Program  
Prioritas 2 :  
Peningkatan  
Ketahanan  
Bencana dan Iklim**

**Kegiatan Prioritas 1:  
Pencegahan  
Pencemaran dan  
Kerusakan Sumber  
Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 3:  
Pemulihan  
Pencemaran dan  
Kerusakan Sumber  
Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup**

**Program Prioritas 1:  
Peningkatan Kualitas  
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 2:  
Penanggulangan  
Pencemaran dan  
Kerusakan Sumber  
Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan  
dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya  
Alam dan Lingkungan Hidup**

**Pro-PN:**

- 1) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah**
- 2) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
- 3) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

# A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

## DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	68%	PHLHK
		02. Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan kehutanan yang ditangani	610 Kasus	PHLHK
		03. Jumlah Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.150.000 Hektar	PHLHK

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2023 mendukung Indikator Kinerja Eselon I (03) Jumlah Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dengan Target sebesar 2.150.000 Hektar, sesuai tabel terpilah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatas. Di Tahun 2023 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Proyek Prioritas sesuai Indikator nomor (3) Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan illegal dengan Target sebesar 85 Operasi.

Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan bidang LHK	2.000 Badan Usaha	PHLHK
		03. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	85 Operasi	PHLHK

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

### **DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Pada Tahun 2023 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Proyek Prioritas sesuai Indikator nomor (3) Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	22 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang

Pada Tahun 2023 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima tambahan Anggaran PNBP yang bersumber dari PNBP Denda Administrasi Bidang Kehutanan, sehingga target kinerja yang mendukung Prioritas Nasional (PN) mengalami perubahan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Top-Up PNBP)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	<b>Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>26</b> <b>Operasi</b>
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **TAHUN 2023**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



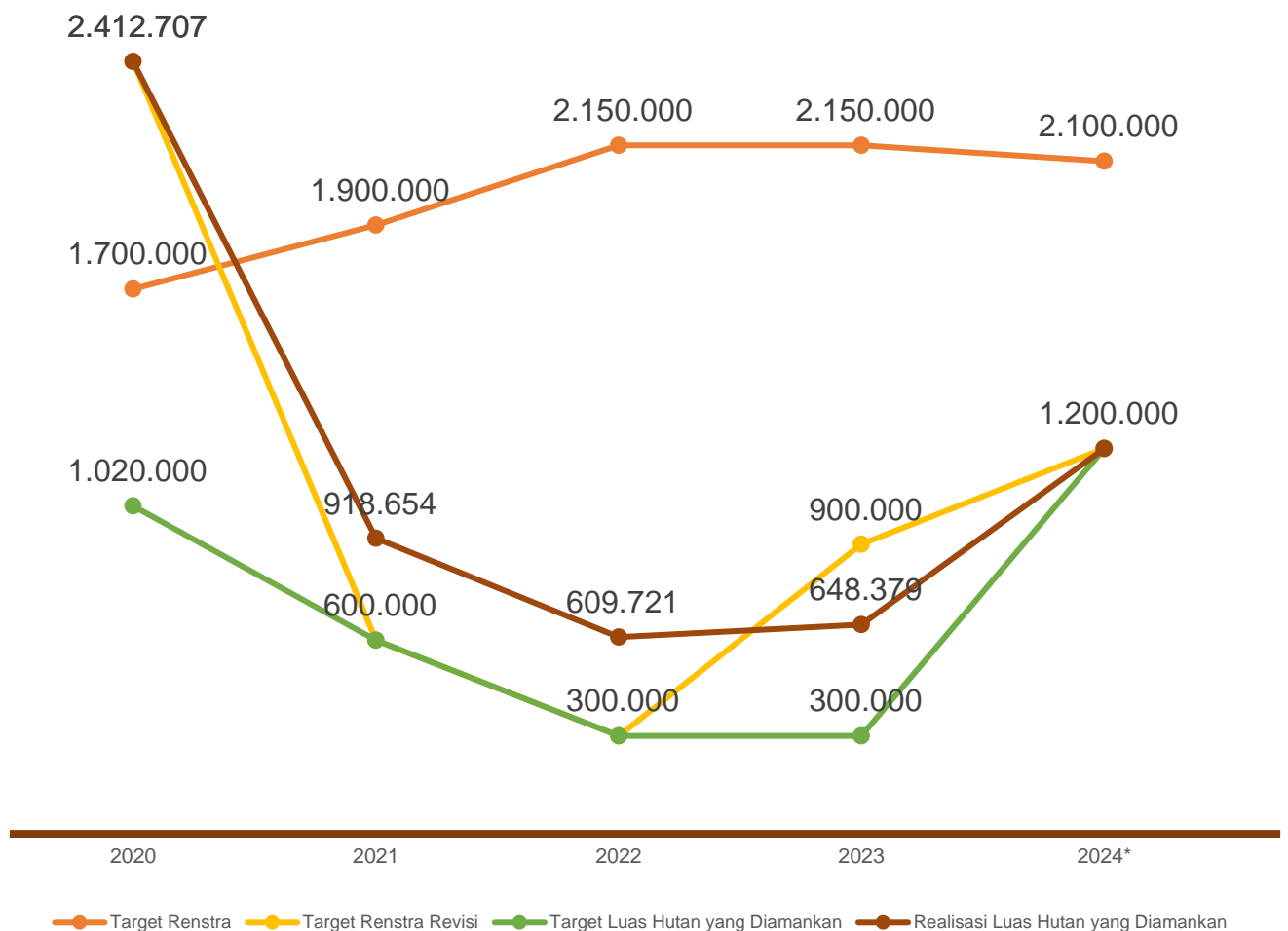
# A. CAPAIAN DAN PROGNOISIS

## INDIKATOR KINERJA UKE I

Total target luas hutan yang diamankan hingga tahun 2024 adalah sebanyak 10.000.000 hektar, sesuai dengan RPJMN dan RENSTRA Ditjen Gakkum. Namun, prognosis capaian total target luas hutan yang diamankan sampai dengan tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebesar +5.789.000 hektar, melebihi total target yang telah ditetapkan hingga tahun 2024 sebesar 3.420.000 hektar. Meskipun terdapat surplus, masih terdapat GAP yang menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

Perhitungan luas kawasan hutan diperoleh dari luas kawasan hutan yang menjadi lokus operasi khususnya tipologi Perambahan, PETI dan *illegal logging*. Nilai persentase capaian kinerja diperoleh dari rumus 
$$\frac{\text{Jumlah Luas Hutan yang Diamankan (Ha)}}{\text{Target (Ha)}} \times 100\%$$

NAMA K/L	: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PILAR	: LINGKUNGAN
TUJUAN	: KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
PROGRAM	: PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (PHB)



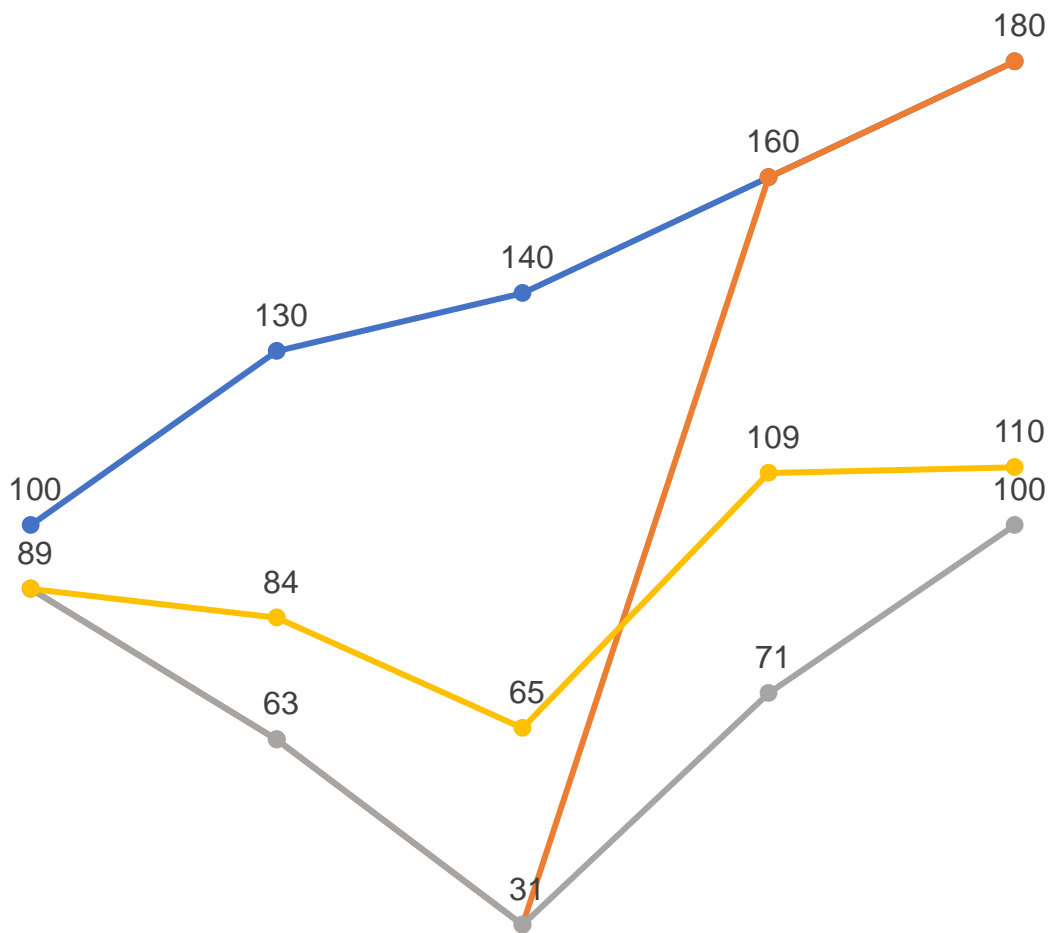
\* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2024

# B. CAPAIAN DAN PROGNOISIS

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Prognosis capaian kinerja total hingga tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebanyak 448 operasi dari target 354 operasi. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap sebesar 262 operasi dengan target RPJMN 2020 s.d 2024. Gap ini disebabkan karena faktor perubahan anggaran dan kondisi situasional tahunan, contohnya ialah adanya *Automatic Adjustment (AA)* dan *refocusing* anggaran akibat pandemi, dan lainnya. Sehingga, gap ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAMANAN HUTAN  
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAWASAN SUMBER DAYA ALAM (QHD)



2020 2021 2022 2023 2024\*

● RPJMN 2020 s.d 2024 ● Renstra 2020 s.d 2024 (Revisi) ● Rencana Kerja (Target) ● Capaian Kinerja

\* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2024

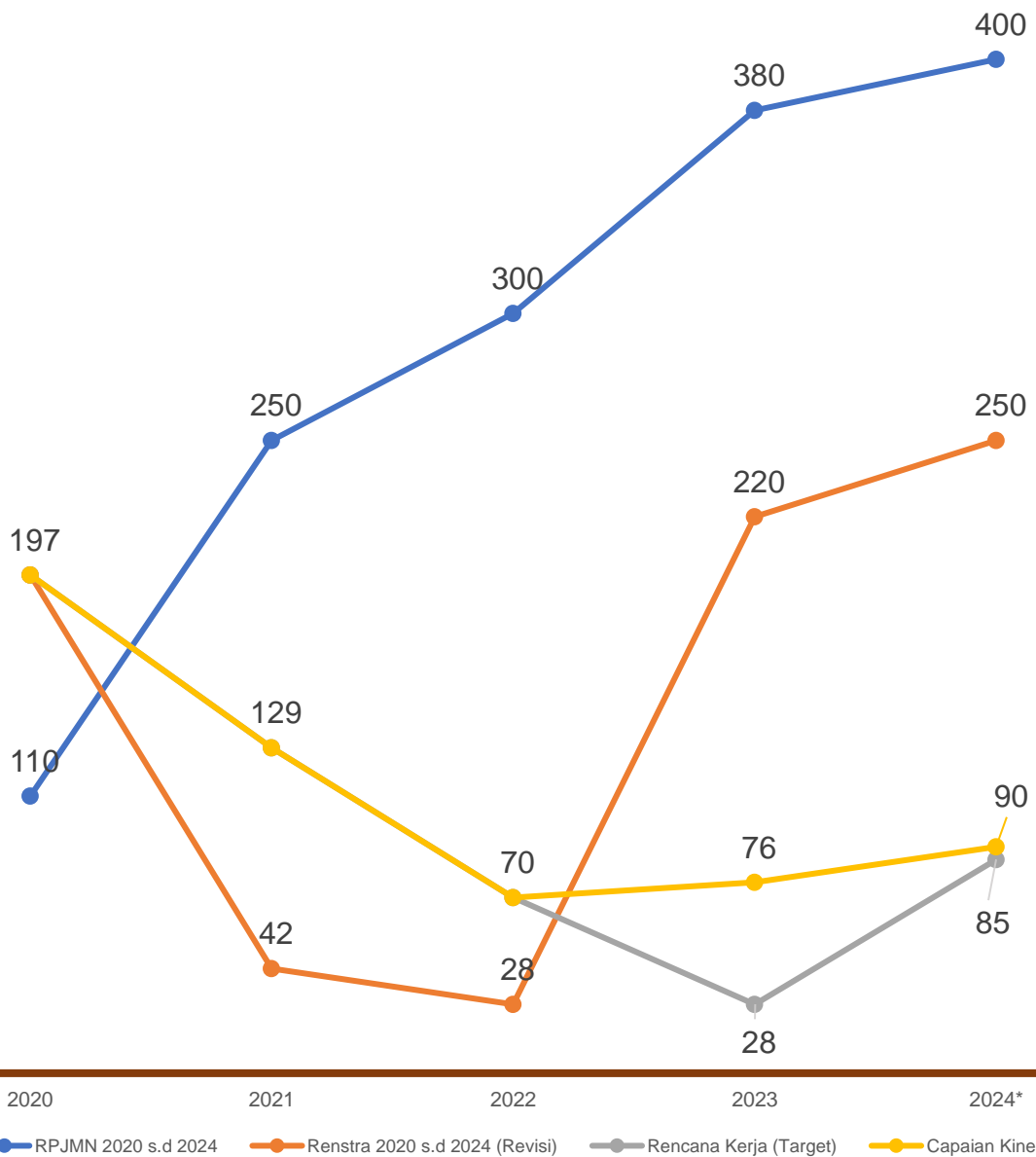
# B. CAPAIAN DAN PROGNOISIS

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Prognosis capaian kinerja total hingga tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebanyak 526 operasi dari target 509 operasi. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap antara Dokumen RPJMN dengan Dokumen Rencana Kinerja yang perlu dioptimalisasi. Gap ini disebabkan karena faktor perubahan anggaran dan kondisi situasional tahunan, contohnya ialah adanya *Automatic Adjustment (AA)* dan *refocusing* anggaran akibat pandemi, dan lainnya.

RINCIAN OUTPUT : OPERASI PEREDARAN HASIL HUTAN ILEGAL

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAWASAN SUMBER DAYA ALAM (QHD)



\* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

# B. CAPAIAN DAN PROGNOSIS

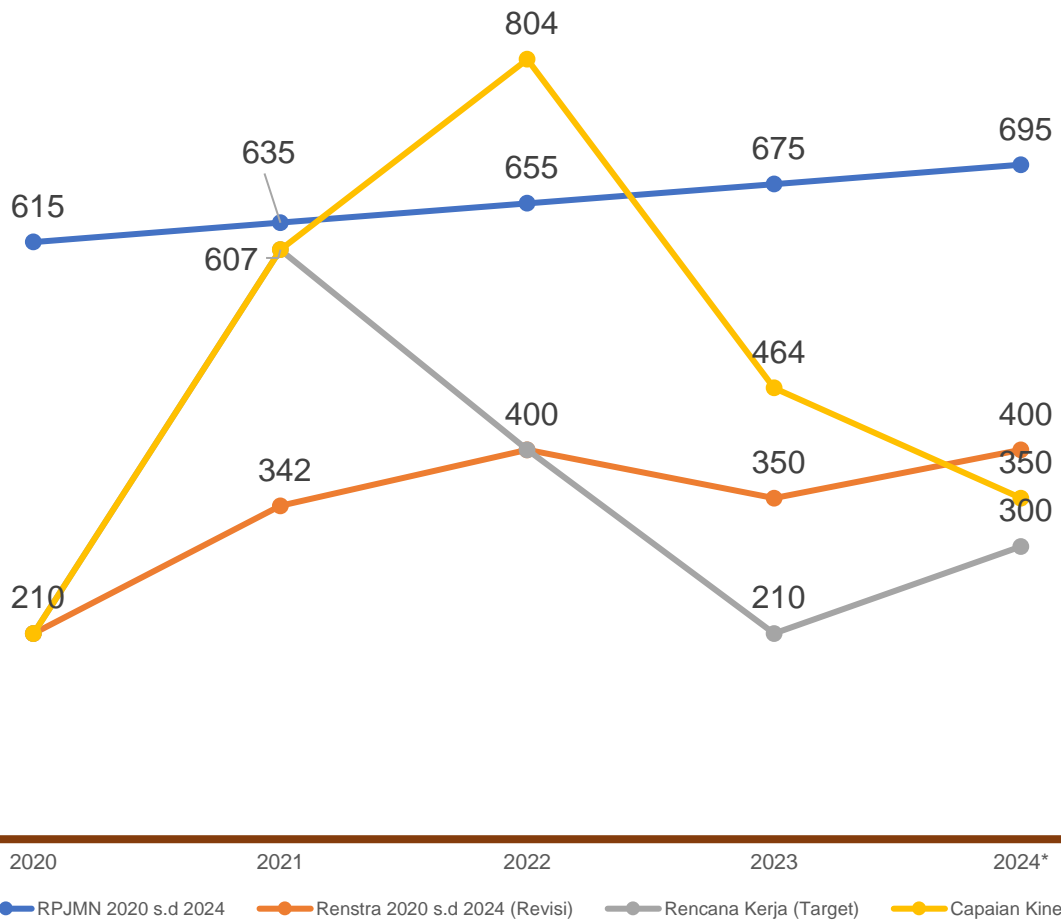
## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Prognosis menunjukkan adanya peningkatan total hingga tahun 2024 sebanyak 2.492 orang dari target total 1.727 orang. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap antara Dokumen RPJMN dengan Dokumen Rencana Kinerja yang perlu dioptimalisasi. Gap ini disebabkan karena faktor perubahan anggaran dan kondisi situasional tahunan, contohnya ialah adanya *Automatic Adjustment (AA)* dan *refocusing* anggaran akibat pandemi, dan lainnya.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Target Renstra 2020 s.d 2024	615	635	655	675	695
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	210	342	400	350	400
Target Renja Jumlah POLHUT	210	607	400	210	300
Capaian Renja Jumlah POLHUT	210	607	804	464	350

RINCIAN OUTPUT : PENINGKATAN KAPASITAS POLISI KEHUTANAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DCE)



\* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2024

# C. CAPAIAN DAN PROGNOSES

## INDIKATOR KINERJA DIT. PPLHK

Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang bagi pemerintah dikarenakan berbagai kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan diiringi modus operandi yang bervariasi. Selain itu, diperlukan polisi kehutanan yang berkualitas dalam menanggulangi segala bentuk ancaman kejahatan tindak pidana kehutanan yang terjadi. Namun dengan optimisme semua jajaran pegawai lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dukungan UPT di wilayah terhadap tantangan peningkatan kasus kejahatan LHK dapat dilalui dengan baik terbukti selama kurun waktu 12 bulan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan operasi penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal (perambahan, TSL, pembalakan liar dan pertambangan tanpa izin) di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, capaian pelaksanaan kegiatan sepanjang yang dilaksanakan sesuai Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan Eselon II	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	13 Operasi	13 Operasi	26 Operasi	27 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi	10 Operasi	6 Operasi	13 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	785 Orang	135 Orang	141 Orang

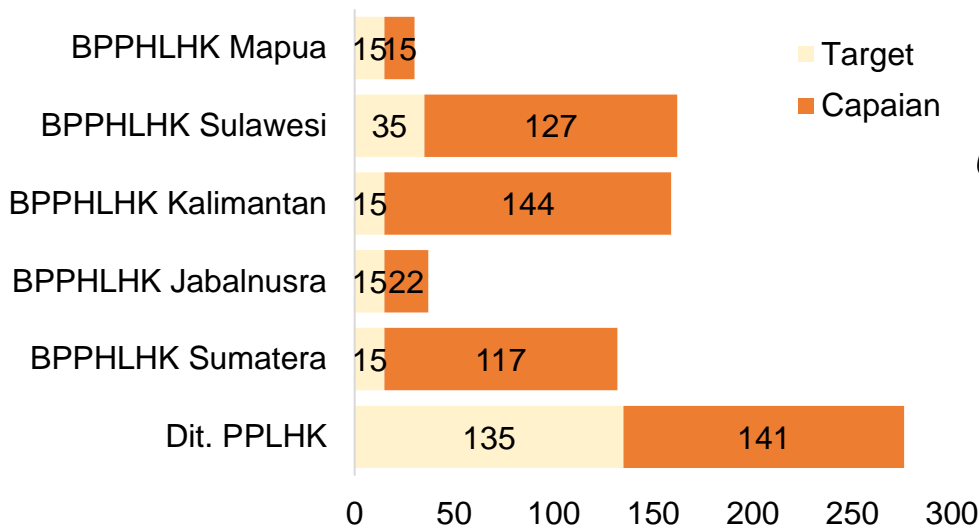
$$CRO = \left( \prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :  
 CRO = capaian RO tingkat satuan kerja  
 RVRO<sub>i</sub> = realisasi volume RO i  
 TVRO<sub>i</sub> = target volume RO i  
 m = Jumlah RO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan Eselon II	Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	TVRO <sub>i</sub> 2023	RVRO <sub>i</sub> 2023	m %
1	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi Bidang Keamanan (QHB)	Operasi	26	27	103,85%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Bidang Keamanan (QHB)	Operasi	6	13	216,67%
		Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DCE)	Operasi	135	141	104,44%
						<b>CRO</b>	<b>141,65%</b>	

• Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L sesuai PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

# PENINGKATAN KAPASITAS POLISI KEHUTANAN



Berdasarkan data tersebut, terjadi selisih yang cukup besar antara capaian dan target. Hal ini disebabkan karena adanya *cost sharing* penggunaan anggaran APBN dan dana hibah dari *UNDP Project* maupun bantuan dana dari mitra lainnya. Secara umum, capaian peningkatan kapasitas Polhut telah melebihi target yang ditentukan.

Polhut memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dan untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan tindak lanjut penegakan hukum.

Dalam rangka peningkatan kapasitas penegakan hukum khususnya Polhut dan SPORC, maka Dit. PPLHK dibawah Ditjen Gakkum LHK melakukan beberapa upaya, diantaranya:

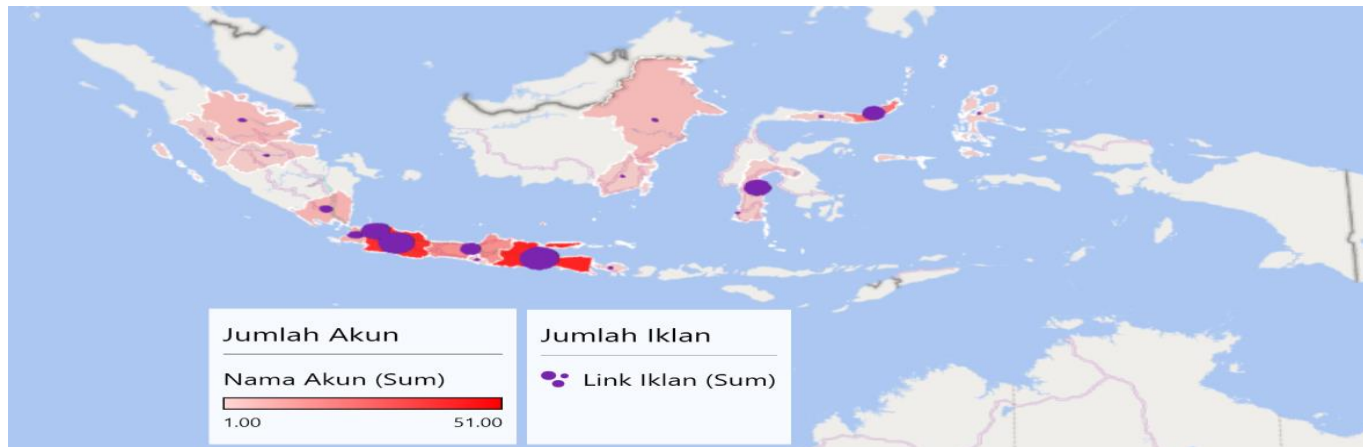
1. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan;
2. Peningkatan Kompetensi Polhut dalam rangka Wana Lestari;
3. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Investigasi Polhut;
  - Diklat Investigasi / Intelijen Dasar dan Lanjutan
  - Pelatihan Lanjutan Investigasi Tim Pasopati
  - Pelatihan Digital Forensik
3. Peningkatan kesamaptaan dan keterampilan Menembak Polhut dan SPORC.

## RAKOR POLISI KEHUTANAN

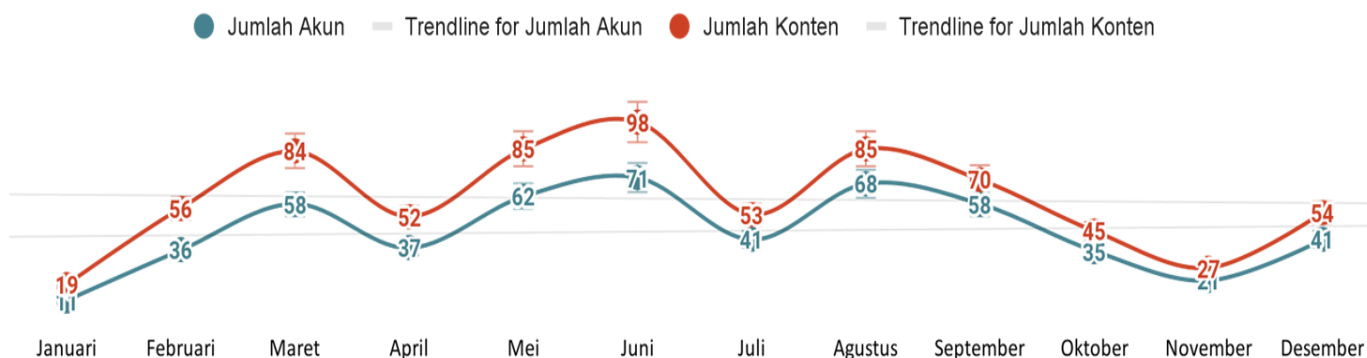
Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan **Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Penegakan Hukum** yang mengangkat tema “**Retrospeksi dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Perspektif Restorative Justice**”. Khususnya Polisi Kehutanan, dalam rakor ini disebutkan bahwa Polisi Kehutanan telah melaksanakan kegiatan operasi di berbagai tipologi yang mampu mencegah terjadinya kerugian negara ratusan milyar akibat kejahatan bidang LHK. Selain itu, terdapat rekomendasi implementasi Sistem Polhut Satu Kesatuan Komando, Dimana Polhut diwadahi oleh satu Ditjen yang menangani Polhut berdasarkan Keputusan Menteri LHK yaitu Ditjen Gakkum LHK sebagai pemegang komando Polhut. Selain itu, diperlukan merasionalisasi jumlah dan distribusi Polhut melalui program “Polhut Kembali Ke Hutan” serta berbagai penguatan sarana dan prasarana serta SDM Polhut.

# PATROLI SIBER SATWA LIAR

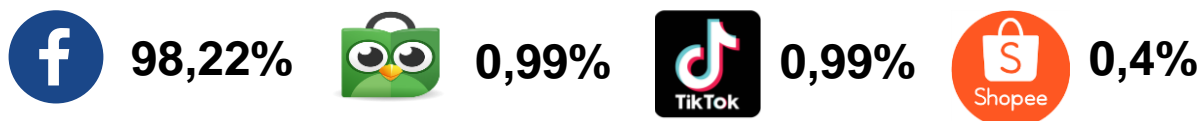
## Peta Sebaran Perdagangan Illegal Satwa Liar PISL)



## Tren PISL Tahun 2023 (Bulanan)



## Media Daring PISL



Selama tahun 2023, terjadi fluktuasi tren perdagangan setiap bulannya. Konten terbanyak yaitu pada bulan Juni sebanyak 98 Konten dengan 71 Jumlah Akun, sedangkan konten paling sedikit yaitu pada bulan Januari sebanyak 19 Konten dengan 11 Jumlah Akun.

Rata-rata tren konten setiap bulannya ialah sebanyak 60 Konten yang didominasi memperdagangkan satwa jenis mamalia, sehingga ini merupakan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa modus dan mekanisme pelaku PISL semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan media daring yang ada yaitu media *Facebook* yang paling sering digunakan (98,22%). Selain itu, PISL melalui *e-commerce* paling banyak terjadi di Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau lainnya di Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan *cyber patrol*, Ditjen Gakkum telah mengimplementasikan aplikasi/ *mobile web* pengenalan/identifikasi jenis TSL dilindungi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengidentifikasi jenis TSL hasil sitaan.

# FASILITASI PENERTIBAN PENGUNAAN SENPI

Dalam penggunaannya, diperlukan Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai adalah surat izin membawa dan/atau menggunakan Senjata Api serta berpedoman pada Perpol No. 1 Tahun 2022 tentang Senpi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Data, maka diperoleh hasil antara lain :

NO	JENIS	PENGADAAN	BUATAN	JUMLAH PENGADAAN	DITJEN KSDAE	DITJEN PHLHK	DINAS LHK
1.	Pistol Cezka Zbrojovka 83	1996 – 1997	Ceko	500	150	163	187
2.	Pistol P3A	2018	Pindad	20	0	20	0
3.	MOLOT	2006	Rusia	200	0	200	0
4.	PM1-A1	1996 – 1997	Pindad	3000	1326	669	1005
5.	PM3-A1	2018	Pindad	100	0	100	0
JUMLAH				3820	1476	1152	1192

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa total jumlah senpi yang ada ialah sebanyak 3820 buah, dengan kondisi beberapa masih bagus dan dapat digunakan namun sebagiannya lagi sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini disebabkan karena usia barang yang sudah tua. Jumlah senpi yang rusak masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimusnahkan.

Di sisi lain, kebutuhan senpi disesuaikan dengan jumlah Polhut di Indonesia yang berjumlah ±3.900 orang. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus, 1 (satu) senpi dapat digunakan untuk 3 (tiga) polsus artinya terdapat rasio ideal penggunaan senpi ialah 1 : 3.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, dijelaskan bahwa jenis peralatan yang menjadi standar bagi Polhut terdiri atas alat dan sarana. Jenis alat yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polhut adalah (a) senjata api dan amunisi; (b) alat komunikasi; (c) alat navigasi; (d) alat dokumentasi dan intelijen; (e) alat pemadam kebakaran; dan (f) alat pendakian, selam dan penyelamatan. Serta jenis sarana yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polhut adalah (a) sarana mobilisasi; (b) pos dan pondok jaga; (c) tempat penyimpanan barang bukti; (d) tempat penyimpanan senjata dan amunisi; (e) tempat/ruang tahanan; dan (g) asrama Polhut.

Semua peralatan polisi kehutanan yang ada di KLHK hampir seluruhnya sudah terpenuhi, namun dari sisi kuantitas masih kurang seperti senjata api dan amunisi. Untuk sarana yang masih menjadi kendala adalah belum adanya tempat penyimpanan barang bukti dan tempat/ruang tahanan yang memadai.



# D. EFISIENSI PENGGUNAAN DAN KINERJA ANGGARAN

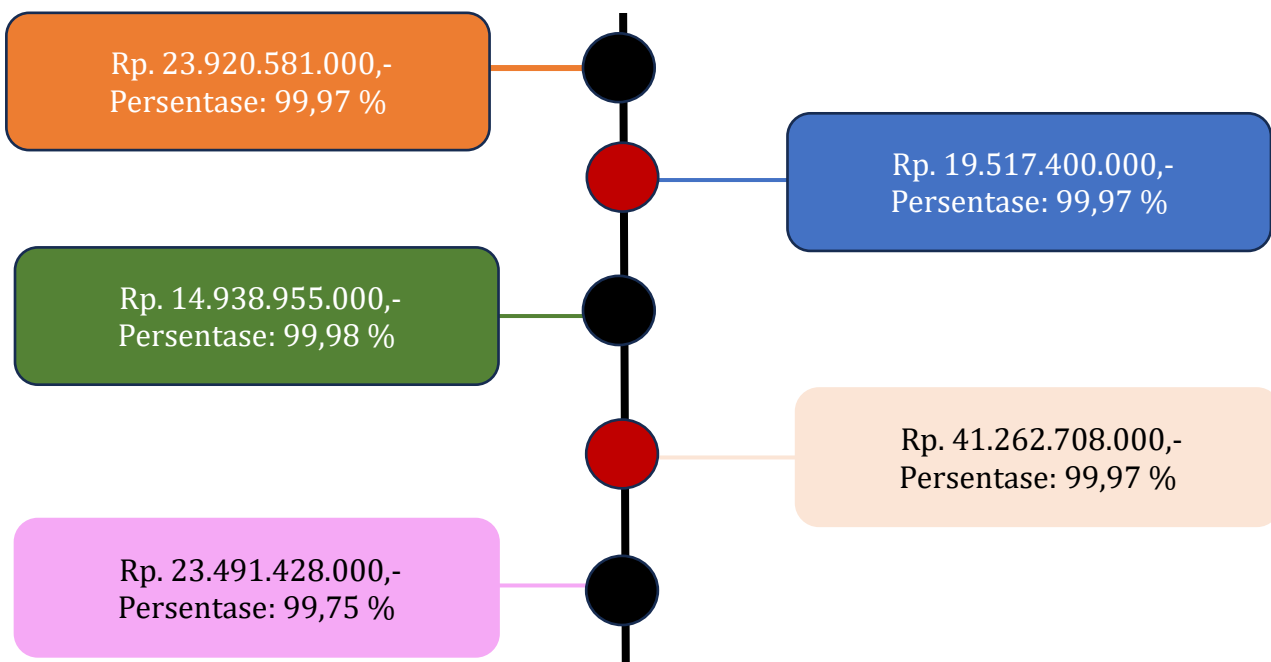
Realisasi anggaran Direktorat PPLHK pada tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 40.961.690.893,-** (Empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar **99,27%** dari total pagu sebesar **Rp. 41.262.708.000,-** (Empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah.)

Top Up PNPB mampu mendukung Dit. PPLHK dalam melaksanakan berbagai kegiatannya untuk mendukung Program Prioritas Nasional, sehingga capaian kinerja mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,27% dari total PAGU sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien. Selain itu, Direktorat PPLHK yang menjadi bagian dari satuan kerja Ditjen Penegakan Hukum LHK meraih Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,23.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 38 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	30.902.802.000	30.800.039.062	99,67%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Ilegal	8.159.906.000	8.001.396.590	98,06%
		Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.200.000.000	2.160.255.241	98,19%
<b>Total</b>			<b>41.262.708.000</b>	<b>40.961.690.893</b>	<b>99,27%</b>

## PERJALANAN ANGGARAN DIT. PPLHK



\* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2024

# EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA DAN ANGGARAN

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Penyerapan Anggaran

RA = Realisasi Anggaran

AA = Alokasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	AA TA.2023	RA TA.2023	P (%) TA.2023
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 38 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	30.902.802.000	30.800.039.062	99,67%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Ilegal	8.159.906.000	8.001.396.590	98,06%
		Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.200.000.000	2.160.255.241	98,19%
			41.262.708.000	40.961.690.893	99,27%

Pada tahun 2023 anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,27% dari total PAGU sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien. Persentase serapan anggaran pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Selain itu, Direktorat PPLHK yang menjadi bagian dari satuan kerja Ditjen Penegakan Hukum LHK meraih Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,23.

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan Eselon II	Capaian RO	Realisasi Anggaran	Efisiensi Penggunaan Anggaran	
1	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	103,85%	99,67%	1,04	<b>EFISIEN</b>
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	216,67%	98,06%	2,21	
3	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	104,44%	98,19%	1,06	
Rata Rata (Average)		141,65%	98,64%	1,44	

## E. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi SAKIP TA 2023 pada seluruh unit kerja di Kementerian LHK, yang merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/59/M.AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2021, disebutkan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK memperoleh Nilai SAKIP sebesar **99,07** dan dengan Predikat “**A**”. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah baik serta telah mewujudkan Pemerintahan Berorientasi Hasil.

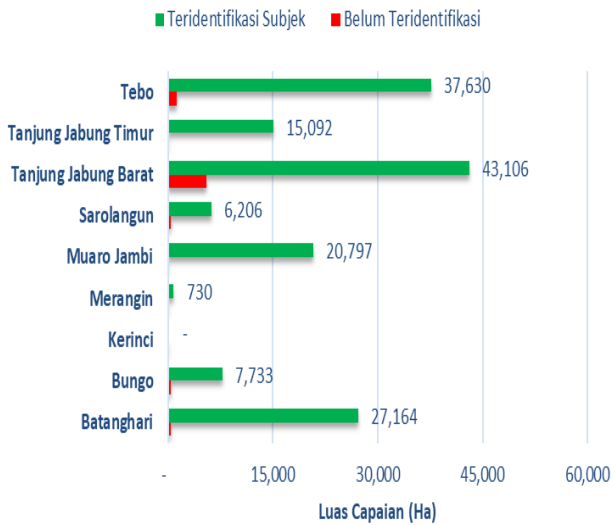
Direktorat PPLHK yang juga merupakan bagian dari Ditjen Penegakan Hukum LHK, pada Tahun 2023 mampu memberikan kinerja yang terbaik yang dibuktikan pada tercapainya target kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal yang didukung dengan SDM Polhut dan SPORC yang kompeten. Pada Tahun 2023, Dit. PPLHK berhasil mengamankan ±648 ribu Hektar kawasan hutan dan menangkap beberapa pelaku kejahatan bidang kehutanan. Dengan adanya kegiatan represif tersebut, dapat mendukung pemulihan kawasan hutan, menjaga keutuhan kawasan dan mencegah peningkatan laju degradasi hutan, serta memperkuat dukungan terhadap implementasi program perhutanan sosial dan pemulihan DAS.



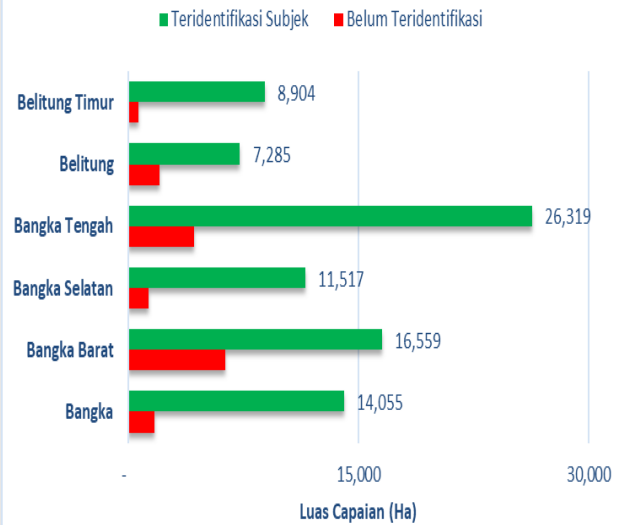
# F. DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

**INVENTARISASI DAN KONSOLIDASI DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN DAN TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN DI 7 (TUJUH) PROVINSI**

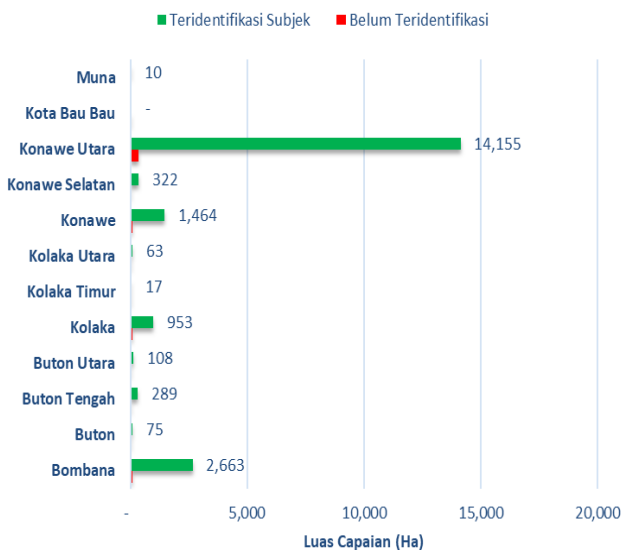
## PROV. JAMBI



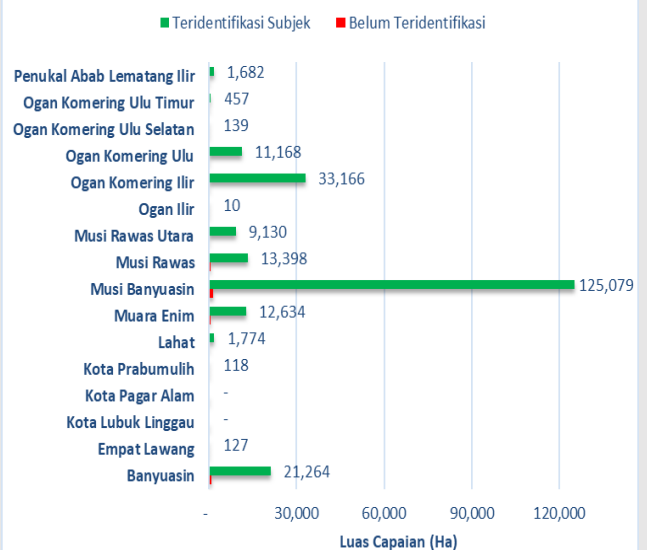
## PROV. KEP BANGKA BELITUNG



## PROV. SULAWESI TENGGARA



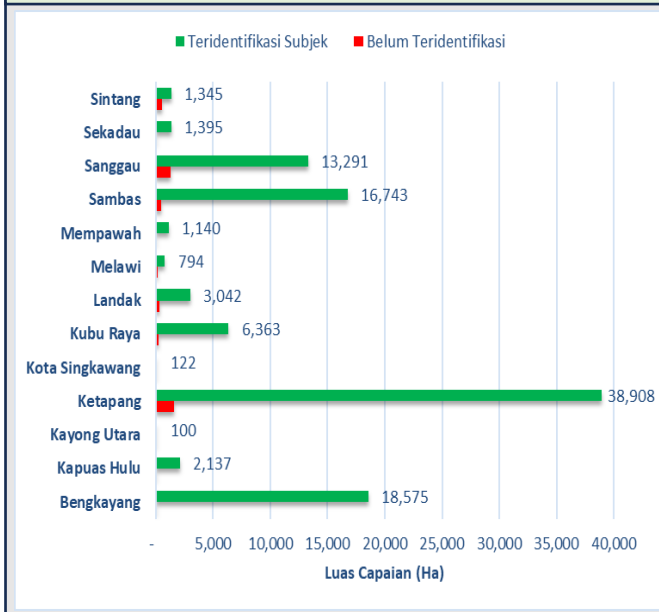
## PROV. SUMATERA SELATAN



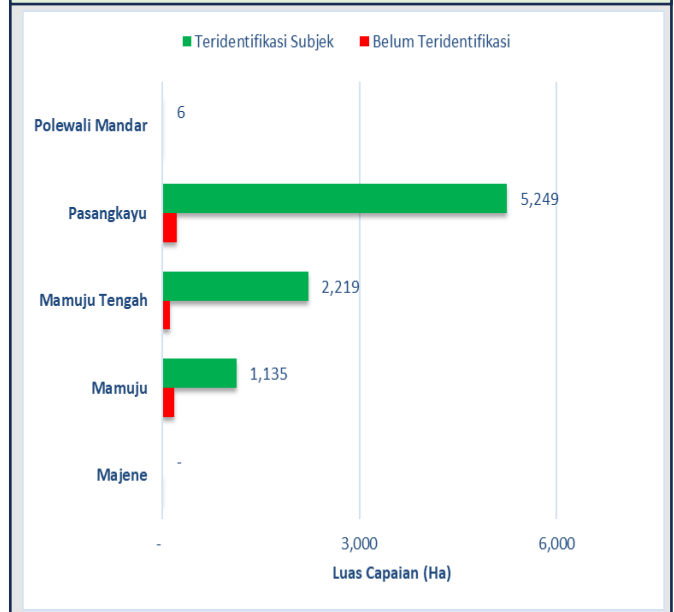
# DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

## INVENTARISASI DAN KONSOLIDASI DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN DAN TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN DI 7 (TUJUH) PROVINSI

### PROV. KALIMANTAN BARAT



### PROV. SULAWESI BARAT



### PROV. KEPULAUAN RIAU



Kegiatan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2021 memandatkan penyelesaian kegiatan usaha kehutanan yang telah terbangun namun belum memiliki perizinan. Kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan kawasan hutan lebih lanjut akibat adanya ekspansi pembukaan kawasan hutan khususnya menjadi kebun sawit. Hal ini dikarenakan kebun sawit memiliki berbagai dampak negatif pada kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan berkurangnya populasi satwa.



# **BAB IV**

## **PENUTUP**

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Direktorat PPLHK telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023.
2. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Direktorat PPLHK pada tahun 2023 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.
3. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran tahun 2023, diperoleh hasil bahwa CRO Tahun 2023 ialah sebesar 141,65% dan Rata-Rata Nilai Efisiensi Anggaran ialah sebesar 1,44. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1.
4. Penyerapan anggaran Direktorat PPLHK pada tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 40.961.690.893,- (Empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)** atau sebesar **99,27%** dari total pagu sebesar **Rp. 41.262.708.000,- (Empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah.)**
5. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja dari setiap kegiatan, program dan pencapaian meliputi:
  - a. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan sebagian kurang dapat diprediksi tata waktu pelaksanaannya khususnya operasi pengamanan hutan membutuhkan pra kondisi yang cukup memakan waktu antara lain koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya;
  - b. Keterbatasan jumlah sumberdaya tenaga pengamanan hutan serta sarana prasarana yang tersedia, terutama bagi Polhut, SPORC dan PPNS yang handal serta tenaga intelijen bila dibandingkan dengan permasalahan, luas kawasan hutan dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada;
  - c. Belum adanya Pejabat Pengawas Kehutanan untuk melaksanakan pengawasan bidang kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana kehutanan.

## B. SARAN

1. Dalam rangka mengupayakan percepatan pelaksanaan pencairan dan ketersediaan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan penjadwalan yang telah direncanakan maka diperlukan perencanaan anggaran pada setiap pelaksanaan dan monitoring anggaran tersedia per triwulan;
2. Pelaksanaan kegiatan puldasi berdasarkan peta kerawanan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, maupun arahan pimpinan dalam rangka penyusunan skala prioritas lokasi penanganan tindak pidana kehutanan;
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesamaptaan dan keterampilan tenaga pengamanan hutan terutama Polhut dan SPORC;
4. Penyusunan SOP Teknis pelaksanaan kegiatan PPLHK serta rekomendasi Polhut yang menjadi Pejabat Pengawas Kehutanan.

# **LAMPIRAN**





## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

Jabatan : Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta ~~25~~ Desember 2023

**Pihak Kedua,**

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP 19660711 199203 1 018

**Pihak Pertama,**

Plt. Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

Dr. Ir. Sustyo Iriyono, M.Si  
NIP. 19620621 199002 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Revisi Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	26 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang

**Kegiatan :**

1. Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

**Total Anggaran**

**Revisi Anggaran :**

Rp41.262.708.000,00

Rp1.269.970.000,00

**Rp42.532.678.000,00**

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,**

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

**Pihak Pertama,**

Plt. Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan



Dr. Ir. Sustyo Iriyono, M.Si  
NIP. 19620621 199002 1 001